

TESIS

**KEBERADAAN ANAK JALANAN DI KOTA MAKASSAR DALAM TINJAUAN
SOSIOLOGI POLITIK**



Disusun Oleh:

GALANK PRATAMA

E052202010

**PROGRAM MAGISTER ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

KEBERADAAN ANAK JALANAN DI KOTA MAKASSAR DALAM TINJAUAN SOSIOLOGI POLITIK

Nama Mahasiswa : Galank Pratama

Nomor Pokok : E052202010

Program Studi : S2 Ilmu Politik

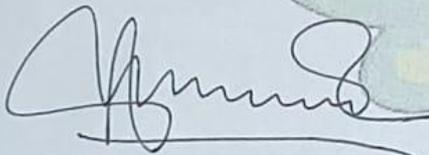
Tesis ini dibuat sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Magister
pada Sekolah Pasca Sarjana Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Makassar, 4 Agustus 2023

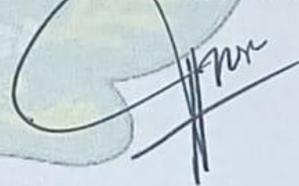
Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



Prof. Armin Arsyad, M.S.i
NIP. 19651109 199103 1 008



Dr. Gustiana A. Kambo, S.IP., M.Si
NIP. 19730813 199803 2 001

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Politik



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Galank Pratama
NIM : E052202010
Program Studi : Magister Ilmu Politik
Jenjang : Strata 2 (S2)

Menyatakan bahwa Tesis dengan judul **“Keberadaan Anak Jalanan di Kota Makassar Dalam Tinjauan Sosiologi Politik”**.

Adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Tesis karya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka bersedia menerima sanksi

Makassar, 24 Agustus 2023

Yang membuat pernyataan



Galank Pratama

NIP. 19710705 199803 2 002
ABSTRAK

Galank Pratama. NIM E052202010. Keberadaan Anak jalanan Di Kota Makassar Dalam Tinjauan Sosiologi Politik. Di bawah bimbingan Bapak **Armin Arsyad** dan Ibu **Gustiana A Kambo**

Perkembangan kota yang semakin pesat kemudian menjadi faktor yang menyebabkan banyaknya perubahan mulai dari pola pemanfaatan lahan sampai dengan perubahan sistem budaya yang beraneka ragam membuat munculnya ketimpangan antara masyarakat kota itu sendiri. Mulai dari ketimpangan ekonomi sampai dengan sulitnya masyarakat miskin memperoleh akses-akses untuk memenuhi kebutuhan kesehariannya, ketimpangan inilah yang kemudian menjadi penyebab munculnya anak jalanan di kota makassar.

Penelitian di lakukan menggunakan metode kualitatif deskriptif, pengambilan data dilakukan dengan mewawancarai informan kunci yang dianggap dapat menjelaskan penyebab keberadaan anak jalanan dan upaya penanggulangan keberadaan anak jalanan di kota makassar. serta melengkapinya dengan beberapa refrensi tertulis yang dianggap sesuai dengan kebutuhan penelitian. Adapun pendekatan dan teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan sosiologi politik untuk melihat penyebab terjadinya permasalahan sosial sehingga menyebabkan keberadaan anak jalanan, serta teori produksi ruang ala levebre dan david harvey yang digunakan untuk menganalisis pembangunan kota dan keberadaan anak jalanan.

Hasil penelitian ini menjelaskan tentang penyebab keberadaan anak jalanan yang di sebabkan oleh faktor kemiskinan, pembangunan kota, dan eksploitasi yang dilakukan terhadap anak jalanan di kota makassar, adapun upaya yang dilakukan untuk menanggulangi permasalahan terkait keberadaan anak jalanan ini ialah dengan melakukan berbagai upaya penjangkauan maupun dengan melakukan pembinaan terhadap anak jalanan, upaya yang dilakukan tersebut belum mampu membuat perubahan yang signifikan terhadap keberadaan anak jalanan karena pembangunan kota dan pemanfaatan ruang yang dilakukan oleh pemerintah dan pemilik modal membuat masyarakat miskin memanfaatkan ruang tersebut untuk melakukan eksploitasi maupun kegiatan ekonomi yang mengorbankan anak jalanan.

Kata Kunci : Anak Jalanan, Pemanfaatan Ruang Perkotaan, Sosiologi Politik

ABSTRACT

Galank Pratama. NIM E052202010. The Existence of Street Children in Makassar City in the Review of Political Sociology. Under the guidance of Mr. **Armin Arsyad** and Mrs. **Gustiana A Kambo**.

The rapid development of the city then becomes a factor that causes many changes ranging from land use patterns to changes in diverse cultural systems that make the emergence of inequality between the urban community itself. Starting from economic inequality to the difficulty of the poor to gain access to meet their daily needs, this inequality is then the cause of the emergence of street children in the city of Makassar.

The research was conducted using a qualitative descriptive method, data collection was carried out by interviewing key informants who were considered to be able to explain the causes of the existence of street children and efforts to overcome the existence of street children in the city of Makassar. and complement it with several written references that are considered in accordance with the research needs. The approaches and theories used in this research are the political sociology approach to see the causes of social problems that cause the existence of street children, as well as levebre and David Harvey's spatial production theory used to analyze urban development and the existence of street children.

The results of this study explain the causes of the existence of street children caused by poverty, urban development, and exploitation of street children in the city of Makassar, as for the efforts made to overcome the problems related to the existence of street children is to carry out various outreach efforts and by providing guidance to street children, the efforts made have not been able to make significant changes to the existence of street children because urban development and space utilization carried out by the government and capital owners make poor people take advantage of this space to carry out exploitation and economic activities at the expense of street children.

Keywords: Street Children, Urban Space Utilization, Political Sociology

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya penulis hingga saat ini diberikan kesehatan serta dapat menyelesaikan karya ilmiah tesis ini, yang merupakan syarat untuk mendapatkan gelar magister di Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Shalawat dan salam tak lupa penulis junjungkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai pembawa cahaya serta petunjuk kepada seluruh umat manusia hingga akhir zaman.

Tesis ini penulis persembahkan untuk keluarga tercinta, yaitu Ibu **Rahmah S.Ip**, dan Ayah penulis **Sudirman S.E** yang selalu memberikan dukungan serta iringan doa siang dan malam yang tiada henti – hentinya selalu terucap, terima kasih atas didikannya selama ini, sehingga menjadi alasan utama tesis ini bisa dan harus diselesaikan. Kepada saudarasaudara tercinta **Gusti Ramadhan Dwi Putra, Gibran Sadiq Tri Putra**. yang tidak pernah putus memberikan keceriaan, doa, serta dukungan baik secara moril maupun material, beserta seluruh keluarga besar yang penulis tidak sempat sebutkan satu persatu, terima kasih semua atas dorongan, motivasi, perhatian, dukungan, dan doa di saat susah dan senang kepada penulis selama ini.

Penulis menyadari selesainya tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan, arahan dan dukungan

kepada penulis dalam pembuatan tesis ini, maka dari itu penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. **Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc** selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. **Bapak Dr. Phil. Sukri, S.IP., M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan **Bapak Drs. Andi Yakub, M.Si., Ph.D.** selaku Ketua Departemen Ilmu Politik serta bapak **Haryanto, S. IP., M.A** selaku Sekretaris Departemen Ilmu Politik.
3. **Bapak Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si** selaku pembimbing I, yang telah memberi nasehat dan bimbingan kepada penulis selama perkuliahan hingga penyelesaian tesis ini.
4. **Ibu Dr. Gustiana A. Kambo S.IP. M.Si** selaku penasehat pembimbing II, yang telah banyak membantu, mengarahkan dan membimbing penulis hingga dapat menyelesaikan tesis ini.
5. Kepada Bapak Ibu Dosen Prodi Ilmu Politik, **Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si, Prof. Muhammad, S.IP., M.Si, Drs. H. A. Yakub, M.Si., Ph.D, Dr. Gustiana A. Kambo S.IP. M.Si., Dr. Ariana Yunus, S.IP M.Si, Haryanto, S.IP, M.A, Andi Ali Armunanto, S.IP. M.Si., A.Naharuddin S.IP, M.Si., Dr. Muhammad Saad, MA., Dr. Phil. Sukri, S.IP, M.Si, Sakinah Nadir S.IP, M.Si., Endang Sari, S.IP, M.Si, Dr. Muhammad Saad, M.A, Ummi Suci Fathia, S.IP, M.Si, Muh. Imran, S.IP, M.Si, Zulhajar, S.IP, M.Si, Dian Ekawaty, S.IP. M.Si**

Terima Kasih atas ilmu yang telah diberikan selama ini, semoga penulis dapat memanfaatkan dengan sebaik mungkin.

6. Seluruh Staf khususnya Departemen Ilmu Politik, serta staf administrasi Pascasarjana di Lingkup FISIP UNHAS tanpa terkecuali. Terima kasih atas bantuan yang tiada hentinya bagi penulis selama ini.
7. Terima kasih kepada para informan semua informan yang terlibat pada penelitian ini khususnya Kakak H. Ray Suryadi S.Ip selaku Sekretaris Fraksi demokrat sekaligus Anggota komisi D DPRD Kota Makassar. Kakak Masri selaku kepala RPTC Dinsos Kota Makassar. Kakak Irma selaku ketua KPAJ Kota Makassar. Serta Adik – Adik Anak Jalanan yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi yang sesuai dengan yang peneliti butuhkan untuk menunjang skripsi ini, memberikan banyak bantuan dan kemudahan kepada penulis.
8. **Keluarga Besar Himapol FISIP Unhas** yang tidak bisa saya sebutkan namanya, terima kasih atas dukungan dan dorongannya selama penulis memimpin lembaga. Tanpa Himapol, penulis tidak akan bisa seperti ini. Terima kasih.
9. Kawan seperjuangan Saudara-Saudaraku **Delegasi 15** Terkhusus Fichri, Jonny , Asrunil, Rifan,Asnul mufidah, Siska, Dan Susi.
10. **Kawan seperjuangan di Kema FISIP Unhas**, yang senantiasa memberikan arahan dan masukannya. Terkhusus Saudara Eriku Sumule, Ardan,Azwar

11. **Keluarga Besar HPMT Unhas Yang senantiasa Menjadi Rumah Bagi Penulis.**
12. **Keluarga Besar Kema Fisip Unhas yang senantiasa menjadi ruang belajar bagi penulis.**
13. **Lembaga-lembaga Serta Komunitas** kemahasiswaan yang memberikan banyak pengalaman bagi penulis **Pondok Integritas** dan **Resist Sospol**. Yang senantiasa menjadi ruang belajar bagi penulis.
14. Terimakasih kepada **Nur Yasmin Zul** perempuan hebat dan istimewa yang hadir didalam Hidup penulis, dan senantiasa menjadi sumber inspirasi dan menjadi penyemangat dikala penulis kehilangan arah dan mampu Mendorong Penulis untuk menyelesaikan karya tulis ini, sekali lagi terimakasih.

Selebihnya terima kasih dan mohon maaf kepada seluruh teman-teman yang terlupa dan tak bisa penulis tuliskan satu-persatu, sesungguhnya kalian tetap teringat sebagai catatan akhir kuliah di kehidupan kemahasiswaan penulis. Akhirnya penulis menyadari atas segala keterbatasan, untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Sekian dan terima kasih.

Makassar, JULI 2023

GALANK PRATAMA

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	II
ABSTRAK	III
ABSTRACT	IV
KATA PENGANTAR.....	V
DAFTAR ISI.....	IX
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 RUMUSAN MASALAH	9
1.3 TUJUAN PENELITIAN.....	9
1.4 MANFAAT PENELITIAN	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 PENDEKATAN SOSIOLOGI POLITIK.....	11
2.1.1 PANDANGAN SOSIOLOGI TERHADAP MASALAH SOSIAL	15
2.1.2 MASALAH KEMISKINAN	16
2.2 TEORI PRODUKSI RUANG	18
2.2.1 KONTESTASI RUANG	21
2.2.2 HAK ATAS KOTA.....	25

2.3 TEORI RUANG SPATIAL.....	27
2.4 TELAHAH PUSTAKA	42
2.5 KERANGKA PEMIKIRAN.....	45
2.6 SKEMA PEMIKIRAN.....	46
BAB III METODE PENELITIAN	47
3.1 LOKASI PENELITIAN.....	47
3.2 PENDEKATAN PENELITIAN	47
3.3 JENIS DATA PENELITIAN.....	48
3.4 SUMBER DATA DAN INFORMAN PENELITIAN	49
3.5 TEKNIK PENGUMPULAN DATA.....	50
3.6 TEKNIK ANALISIS DATA	53
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	55
4.1 KOTA MAKASSAR	55
4.1.1. WILAYAH ADMINISTRASI KOTA MAKASSAR.....	55
4.1.2 KEADAAN DEMOGRAFI DAN SOSIAL EKONOMI KOTA MAKASSAR.....	56
4.1.3 GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN KOTA MAKASSAR.....	57
4.2 UNDANG – UNDANG YANG MENJADI ACUAN PERLINDUNGAN ANAK JALANAN.....	59
4.3.1 PENJEJESAN TERKAIT PERDA NOMOR 02 TAHUN 2008 TENTANG ANAK JALANAN, PENGEMIS, PENGAMEN, DAN ORANG TERLANTAR.....	65

BAB V PEMBAHASAN.....	73
5.1 FAKTOR BERTAMBAHNYA JUMLAH ANAK JALANAN DI KOTA MAKASSAR.....	73
5.1.1. PEMBANGUNAN KOTA.....	73
5.1.2. URBANISASI	79
5.1.3. FAKTOR EKSPLOITASI.....	81
5.2 UPAYA PENANGGULANGAN ANAK JALANAN DI KOTA MAKASSAR.....	89
5.2.1. UPAYA REPRESIF	90
5.2.2. UPAYA PREVENTIF	96
BAB VI PENUTUP	105
6.1 KESIMPULAN	105
6.2 SARAN	107
DAFTAR PUSTAKA	108

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidak mampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata – rata masyarakat di suatu daerah . kondisi ketidak mampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan , sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga berdampak pada berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata- rata seperti standar Kesehatan masyarakat dan standar Pendidikan.¹

Pengertian kemiskinan yang populer saat ini adalah kemiskinan yang serigkali di jumpai di negara-negara berkembang dan negara-negara dunia ketiga. Persoalan kemiskinan masyarakat di negara – negara ini tidak hanya sekedar bentuk ketidakmampuan pendapatan , akan tetapi telah meluas pada bentuk ketidak berdayaan secara sosial maupun politik. Kemiskinan juga dianggap sebagai bentuk permasalahan pembangunan yang yang diakibatkan adanya dampak negatif dari pertumbuhan ekonomi yang tidak

¹ Putri anita rahman.kemiskinan dalam perspektif ilmu sosiologi.jurnal pendidikan tambusai.volume 3 nomor 6 2019.hal 1542

seimbang sehingga memperlebar kesenjangan pendapatan antar masyarakat maupun kesenjangan pendapatan antar daerah.²

Perkembangan kota-kota dipengaruhi oleh proses terjadinya urbanisasi di perkotaan, ini disebabkan oleh pertumbuhan alami maupun migrasi penduduk. Selain itu, perkembangan tersebut juga disebabkan oleh adanya perubahan ekonomi yang dapat dilihat dari adanya pergeseran lapangan pekerjaan dari sector pertanian ke sector non pertanian, seperti perdagangan dan industri . sedangkan berdasarkan aspek sosial, perkembangan wilayah perkotaan dapat dilihat dari adanya perubahan pola pikir dan gaya hidup masyarakatnya.

Perkembangan kota yang semakin pesat kemudian menjadi faktor yang menyebabkan banyaknya perubahan mulai dari pola pemanfaatan lahan sampai dengan perubahan sistem budaya yang beraneka ragam membuat munculnya ketimpangan antara masyarakat kota itu sendiri. Mulai dari ketimpangan ekonomi sampai dengan sulitnya masyarakat miskin memperoleh akses-akses untuk memenuhi kebutuhan kesehariannya.

Kota yang dianggap menjanjikan oleh masyarakat desa untuk mencari kesejahteraan hidup yang lebih baik memaksa mereka mencari ruang guna memenuhi kebutuhan hidup mereka. Tempat – tempat umum

² Ibid.hal1543

kemudian menjadi alternatif bagi mereka dalam mencari nafkah seperti di tempat perbelanjaan, flyover , maupun di persimpangan-persimpangan jalan.

Kemiskinan yang melanda masyarakat di perkotaan mengakibatkan berbagai hal, salah satunya adalah peningkatan jumlah anak jalanan.

Yang berasal dari lemahnya kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Kaum marjinal miskin yang tidak dapat meraih Pendidikan akibat tingginya biaya yang harus di keluarka, pendapatan yang terbatas dan kebutuhan tinggi membuat kaum marjinal putus asa dalam memenuhi kebutuhan Pendidikan anak.

Penyebab meningkatnya anak jalanan dipicu oleh krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998. Pada era tersebut selain masyarakat mengalami perubahan secara ekonomi, juga menjadi masa transisi pemerintahan yang menyebabkan begitu banyak permasalahan sosial muncul. Secara langsung dampak krisis ekonomi memang terkait erat dengan terjadinya peningkatan jumlah anak jalanan di beberapa kota besar di Indonesia.³

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 anak jalanan adalah anak yang menggunakan sebagian besar waktunya di jalanan. Anak jalanan adalah anak yang usianya masih di bawah 18 tahun serta sebagian waktu mereka dihabiskan di tempat umum (jalanan, pasar, pertokoan,

³ Herlina Astri. KEHIDUPAN ANAK JALANAN DI INDONESIA: FAKTOR PENYEBAB, TATANAN HIDUP DAN KERENTANAN BERPERILAKU MENYIMPANG. Aspirasi Vol. 5 No. 2, Desember 2014 hal.148

tempat-tempat hiburan) selama 3-24 jam untuk melakukan aktivitas ekonomi. Anak jalanan adalah sebuah istilah umum yang mengacu pada anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi di jalanan, namun masih memiliki hubungan dengan keluarganya.⁴

Faktor-faktor yang mendorong anak untuk turun ke jalanan yaitu Tingkat Mikro (Immediate Causes) Faktor yang berhubungan dengan anak dan keluarga. Sebab-sebab yang berasal dari keluarga adalah: terlantar, ketidak mampuan orangtua menyediakan kebutuhan dasar, kondisi psikologis karena ditolak orangtua, salah perawatan dari orangtua sehingga mengalami kekerasan di rumah (child abuse). Tingkat Meso (Underlying cause). Yaitu faktor agama berhubungan dengan faktor masyarakat. Sebab-sebab yang dapat diidentifikasi, yaitu, anak-anak yang diajarkan untuk bekerja, Tingkat Makro (Basic Cause). Yaitu faktor yang berhubungan dengan struktur masyarakat (struktur ini dianggap memiliki status sebab akibat yang sangat menentukan –dalam hal ini, sebab: banyak waktu di jalanan, akibatnya: akan banyak uang.⁵

Makassar sebagai salah satu kota metropolitan juga tidak terlepas dari permasalahan ekonomi dan permasalahan sosial seperti keberadaan anak jalanan. Tingginya tingkat kebutuhan baik sandang dan pangan yang tidak dapat di penuhi oleh keluarga akibat dari rendahnya pendapatan yang

⁴ Sakman. Studi Tentang Anak Jalanan (Tinjauan Implementasi Perda Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen di Kota Makassar). Jurnal Supremasi hal.204

⁵ Ibid hal 149

di peroleh menjadi alasan utama anak – anak untuk turun kejalan melakukan kegiatan ekonomi seperti mengemis dan berjualan tissue. Akibat dari banyaknya waktu yang di habiskan oleh anak jalanan di jalan membuat tatanan hidupnya dibentuk dari kondisi yang mereka hadapi. Dalam kesehariannya, anak jalanan selalu berupaya untuk membentuk kelompoknya sendiri yang mereka anggap sebagai keluarga.

Anggota kelompok ini kemudian memiliki peran masing masing dalam melakukan aktivitas dijalanan seperti anggota kelompok yang tertua memiliki peran untuk melindungi anggota kelompok yang lebih muda dari gangguan kelompok anak jalanan lainnya. Selain itu anggota yang tertua juga berperan untuk mengumpulkan hasil mengemis atau jualan anggota yang berumur lebih muda. Kondisi yang dihadapi oleh anak jalanan cenderung marjinal, rentan dan eksploitatif. Marjinal yang dimaksud disini adalah karena anak jalanan memiliki pekerjaan yang tidak jelas prospeknya, kurang dihargai dan sebagainya. Rentan karena mereka bekerja dilingkungan yang rawan baik dari sosial maupun dari segi kesehatan. Eksploitatif dimaksudkan karena anak jalanan memiliki posisi tawar yang rendah.⁶

Dampak dari kehidupan marjinal membuat anak jalanan rentan terpapar kenakalan kenakalan yang bertentangan dengan nilai dan norma yang ada dimasyarakat. Sehingga mengakibatkan terjadinya pergeseran

⁶ Ibid. hal 151

tujuan yang awalnya mereka turun kejalan untuk membantu perekonomian keluarga bergeser kepada mereka mencari uang untuk memenuhi kepentingan untuk mabuk mabukan seperti menggunakan uang mereka untuk membeli lem atau minuman keras untuk mabuk mabukan.

Keberadaan anak jalanan di kota Makassar dapat terlihat di tempattempat umum seperti di persimpangan jalan tol reformasi, Jl.A. Pangerang Petta Rani dan Jl. Sultan Alauddin, persimpangan jalan mesjid raya dan Jl. G.Latimojong, persimpangan Jl. S. Saddang dan Jl. Veteran, persimpangan Jl. Monginsidi dan Jl. Veteran, persimpangan Jl. Landak baru dan Jl. Veteran.Jl.perintis kemerdekaan, Di terminal, tempat pembuangan sampah dan berkeliaran di kantor-kantor pemerintah dan swasta. Sebagian besar anak jalanan di Kota Makassar merupakan pendatang dari beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan antara lain Kabupaten Jeneponto, Maros, Pangkep, Gowa dan Takalar.⁷

Pemerintah Kota Makassar telah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen untuk menanggulangi permasalahan tentang anak jalanan. Sebagai upaya pelaksanaan perda Nomor 2 Tahun 2008. Peran Dinas Sosial dalam pembinaan anak jalanan di Kota Makassar merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah daerah dibidang sosial. Dinas sosial provinsi Sulawesi Selatan dan kota Makassar

⁷ Andi wahyudi.Peran Dinas Sosial Dalam Pembinaan Anak Jalanan Di Kota Makassar.journal unismuh vol2 nomor 4 tahun 2021.hal.1289-1290.

sudah menjaring 163 anak jalanan dan mengalami penambahan sebanyak 332 anak jalanan. Tahun 2020 dinas sosial mengonfirmasi peningkatan jumlah anak jalanan seiring dengan pemberlakuan PSBB.⁸ Sedangkan pada tahun 2021 dinas sosial kota Makassar telah menjaring 78 orang anak jalanan.⁹

Tabel 1. Jumlah Anak Jalan di Kota Makassar Tahun 2020

No.	Kecamatan	Laki- Laki	Perempuan	Jumlah
1	Biringkanaya	6	6	12
2	Tamalanrea	6		6
3	Manggala	4		4
4	Panakkukang	33	12	45
5	Rappocini	8	4	12
6	Makassar	24	3	27
7	Ujung Pandang	1		1
8	Wajo		1	1
9	Bontoala			
10	Tallo	17	4	21
11	Mariso	1	1	2
12	Mamajang	7	3	10
13	Tamalate	16	4	20

⁸ Tuti bahfiarti.kajian penanganan anak gelandangan dan pengemis di kota Makassar.jurnal inovasi dan pelayanan public makasar.hal 44 ⁹ Tribuntimur.com.senin 19 juli 2021 pukul 13.20

14	Sakkarang			
----	-----------	--	--	--

Sumber : Dinas Sosial Makassar Provinsi Sulawesi Selatan

Dinas Sosial dalam melakukan pembinaan anak jalanan melakukan penanganan melalui program yaitu : Program pembinaan pencegahan, Program pembinaan lanjutan, dan program pembinaan rehabilitasi anak jalanan. Program pembinaan pencegahan ini dilakukan dengan kegiatan patroli setiap hari secara rutin oleh Tim Reaksi Cepat Saribattang atau yang disingkat dengan (TRC) yang di bentuk oleh Dinas Sosial Kota Makassar untuk memaksimalkan kinerja terkait anak jalanan di Kota Makassar.⁹

Program pembinaan lanjutan adalah kegiatan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Makassar untuk mengetahui alasan anak turun ke jalanan dengan cara identifikasi atau assesment di RSPA (Rumah Sosial Perlindungan Anak). Program pembinaan rehabilitasi anak jalanan adalah kerja sama Dinas Sosial Kota makassar dengan Yayasan Kelompok Penyalahgunaan Penggunaan Narkoba atau biasa di singkat dengan (YKP2N), anak jalanan yang di assesment dan diketahui menggunakan narkoba atau mengisap lem dan semacamnya maka mereka langsung di rujuk di YKP2N di Jalan Faisal XII Makassar yang berada di naungan Kementrian Sosial.¹⁰ Dinas Sosial Kota Makassar dalam menjalankan programnya masih menemui hambatan yaitu: keterbatasan dana, faktor anak jalanan yang bertambah tiap tahunnya, dan kurangnya tempat pusat

⁹ Ibid hal 1298

¹⁰ Ibid 1298

pembinaan untuk menampung anak jalanan. sehingga hal ini kemudian membuat implementasi Perda nomor 2 tahun 2008 tidak berjalan maksimal.

Kurangnya fasilitas dan keterbatasan anggaran menjadi salah satu aspek yang mengukur bahwa pemerintah kota makassar tidak menjadikan keberadaan anak jalanan sebagai sebuah prioritas masalah yang harus segera diselesaikan, selain itu, jumlah anak jalanan yang terus bertambah setiap tahunnya menjadi suatu permasalahan yang harus segera di selesaikan oleh pemerintah kota makassar. Berdasarkan latar belakang yang telah dituliskan di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam permasalahan mengenai anak jalanan dengan mengangkat judul **“Keberadaan Anak Jalanan Di Kota Makassar Dalam Tinjauan Sosiologi Politik”**

1.2 Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang di atas, peneliti membatasi rumusan masalah yang akan diteliti, menjadi :

1. Mengapa jumlah anak jalanan di kota Makassar terus meningkat
2. Bagaimana upaya pemerintah dalam menanggulangi peningkatan anak jalanan?.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, penelitian ini dilakukan bertujuan untuk :

1. menjelaskan penyebab peningkatan anak jalanan di kota makassar

2. menjelaskan upaya pemerintah dalam penanganan anak jalanan di kota Makassar.

1.4 Manfaat Penelitian

Terdapat beberapa manfaat yang dapat diambil dari pengkajian ini. Peneliti membagi manfaat-manfaat tersebut menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis.

A. Manfaat Teoritis

1. pengkajian ini dapat memberikan sumbangan bagi khasanah Ilmu Politik khususnya dalam kebijakan.
2. pengkajian ini dapat memunculkan argumen-argumen ilmiah baru dalam melihat peran pemerintah terhadap peningkatan jumlah anak jalanan di kota Makassar

B. Manfaat Praktis

1. Pengkajian ini diupayakan dapat menjadi bahan acuan untuk pemerintah dalam membuat kebijakan sehingga kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah berlandaskan dengan titik masalah yang sebenarnya.
2. Pengkajian ini diupayakan dapat menjadi acuan untuk memahami permasalahan anak jalanan yang ada di Makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini peneliti menjelaskan aspek-aspek teoritis yang bersangkutan dengan penelitian yang dilakukan. Konsep-konsep yang dipaparkan dalam bab ini berkaitan dengan pokok bahasan dan hasil penelitian, yang mana juga diterapkan guna membantu peneliti dalam proses penelitian ini.

2.1 Pendekatan Sosiologi Politik

Sosiologi politik memberi perhatian pada peran kekuasaan dan perseorangan, misalnya dampak globalisasi terhadap identitas: fragmentasi dan pluralisasi nilai dan gaya hidup, dengan tumbuhnya media massa dan konsumerisme dan menurunnya pola hidup manusia yang menetap dan komunitas yang tidak stabil, semuanya menunjukkan bahwa identitas yang dulunya dianggap ada begitu saja telah mengalami politisasi.¹¹

Sosiologi dapat dikatakan sebagai ilmu sosial yang paling umum. Sosiologi memberikan sumbangan pada ilmu politik dari analisis terhadap gejala-gejala yang lebih khusus dari pola-pola hubungan yang terjadi dalam masyarakat, yaitu gejala-gejala kekuasaan. Dengan pemahaman pemahaman tentang masyarakat, ilmuwan politik dapat mengetahui

¹¹ . Nurani Soyomukti . PENGANTAR SOSIOLOGI: Dasar Analisis, Teori & Pendekatan Menuju Analisis Masalah-Masalah Sosial, Perubahan Sosial, & Kajian-Kajian Strategis. AR RUZZ MEDIA Hal 406

bagaimana susunan-susunan masyarakat dan stratifikasi sosial memengaruhi atau dipengaruhi oleh, misalnya, pengambilan kebijakan politik (*policy decision*), sumber-sumber kewenangan politik (*source of political authority*), pengendalian sosial (*social control*), dan perubahan sosial (*social change*).¹²

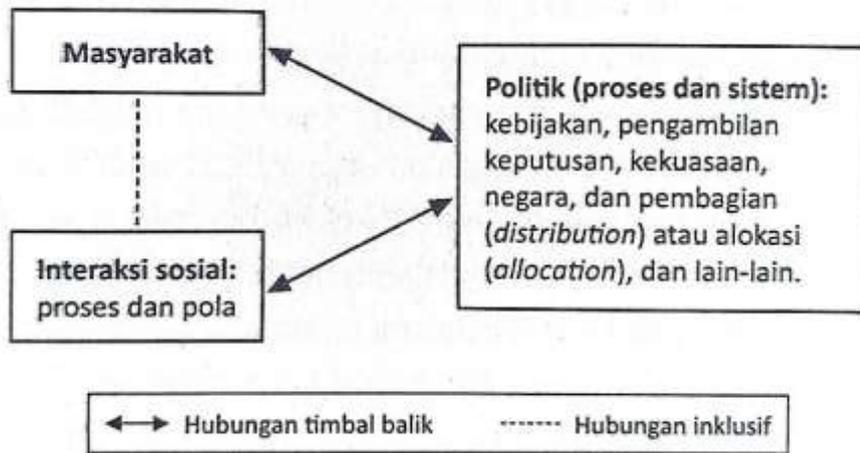
Sosiologi politik (*political sociology*) adalah kajian tentang hubungan antara negara dan masyarakat (*study of relations between state and society*). Terjadi lonjakan paradigma pengertian dalam sosiologi politik dari state centered, class-based models of participation kepada pemahaman tentang politik sebagai potensi yang ter dapat dalam semua pengalaman sosial (an understanding of politics as potential in all social experiences). Sosiologi politik didefinisikan sebagai pendekatan sosiologis yang diterapkan pada fenomena politik. Pendekatan sosiologis terdiri dari konsep-konsep, variabel-variabel, teori-teori, dan metodologi yang digunakan dalam sosiologi untuk memahami kenyataan sosial, termasuk di dalamnya kompleksitas aktivitas yang berkaitan dengan proses dan sistem politik, yang di dalamnya terdapat kekuasaan (*power*), kewenangan (*authority*), kehidupan publik (*public life*), pemerintahan (*governement*), negara (*state*), konflik dan resolusi konflik (*conflict and conflict resolution*), kebijakan (*policy*), pengambilan keputusan (*decision making*), dan pembagian (*distribution*) atau alokasi (*allocation*).

¹² Ibid.hal 407

Sosiologi politik dapat dirumuskan batasannya dengan dua cara. Pertama, sosiologi politik dirumuskan batasannya sebagai suatu kajian yang mempelajari hubungan antara masyarakat, yang didalamnya terjadi interaksi sosial, dengan politik. Dalam hubungan tersebut bisa dilihat bagaimana masyarakat mempengaruhi politik. Juga sebaliknya, bagaimana politik mempengaruhi masyarakat. Dengan pemahaman konsep masyarakat seperti diatas maka sosiologi politik mengkaji masyarakat, yang didalamnya terdapat proses dan pola interaksi sosial, dalam hubungannya dengan politik.

Hubungan dilihat dalam sisi saling pengaruh mempengaruhi. Masyarakat sebagai realitas eksternal-objektif akan menuntun individu dalam melakukan kegiatan politik seperti apa saja yang boleh di politikkan, bagaimana dilakukannya dan bagaimana politik boleh dilakukan. Tuntunan tersebut biasanya berasal dari norma, etika, adat, dan hukum yang berkembang dalam masyarakat. Selanjutnya. Bagaimana politik mempengaruhi masyarakat, yang didalamnya ada proses interaksi sosial. Ketika suatu keputusan politik telah ditetapkan dan disahkan menjadi undang – undang yang mempunyai kekuatan hukum, misalnya undang-undang tentang pemerintah daerah, maka keputusan politik tersebut akan mempengaruhi masyarakat, termasuk orang atau kelompok yang menciptakan keputusan tersebut. Untuk memudahkan pemahaman, berikut disajikan gambar yang menggambarkan hubungan antara masyarakat dan politik.

Diagram Hubungan Antar Masyarakat dalam Politik



Dari gambar diatas diperoleh pemahaman bahwa masyarakat merupakan suatu realitas yang didalamnya terjadi proses interaksi sosial dan terdapat pola interaksi sosial. Hubungan antara antara politik dan masyarakat , termasuk didalamnya ada proses interaksi seperti (sosialisasi politik, partisipasi politik, perekrutan politik, dan komunikasi politik) pola interaksi seperti (budaya politik, dan ideologi politik) bersifat saling mempengaruhi.

Perhatiannya adalah praktik kekuasaan dalam kehidupan sosial sehari-hari, baik yang berhubungan dengan negara maupun non-negara. Kajiannya menyangkut sosialisasi politik, partisipasi politik, identitas dan kultur politik, dan globalisasi kekuasaan. Masalah pokok dalam sosiologi politik juga meliputi masyarakat, negara, tertib sosial, dan perubahannya, ketimpangan dan pelapisan sosial, politik, partisipasi politik, dan kekuasaan. Sosiologi politik juga mengkaji bagaimana pengaruh

masyarakat terhadap norma-norma rezim. Ia mengkaji kondisi-kondisi sosial yang memungkinkan terwujudnya suatu demokrasi politik yang stabil atau persyaratan-persyaratan sosial apa yang harus dipenuhi agar terwujud suatu tatanan politik atau kekuasaan yang demokratis.¹³

2.1.1 Pandangan Sosiologi Terhadap Masalah Sosial

Pandangan sosiologis tentang masalah sosial diakibatkan karena manusia tidak mampu menyesuaikan diri terhadap kenyataan sosial yang senantiasa berubah. Sosiologi yang pada prinsipnya menyoroti masalah sosial sebagai kajian terhadap gejala-gejala kemasyarakatan, sekaligus juga mempelajari aspek tata kelakuan manusia yang dianggap sumber utama timbulnya masalah masalah sosial.¹⁴

Timbulnya masalah sosial pada umumnya banyak disebabkan oleh factor psikologis, biologis dan factor kebudayaan. Menurut daldjuni masalah sosial dapat bertalian dengan masalah alami atau masalah pribadi, maka secara menyeluruh ada beberapa sumber penyebab timbulnya masalah sosial yaitu :

1. factor alam : menyangkut gejala menipisnya sumber daya alam. penyebabnya dapat berupa overeksploitasi oleh manusia dengan eknologinya yang makin maju.

¹³ Ibid hal 408

¹⁴ Abdulsyani. Sosiologi skematika, teori, dan terapan. PT bumi aksara. hal 185

2. Factor biologis: menyangkut bertambahnya umat manusia dengan pesat yang dirasakan secara nasional, regional ,maupun local.
3. Faktor budayawi menimbulkan berbagai keguncangan mental dan bertalian dengan beraneka penyakit kejiwaan. Pendorongnya adalah perkembangan teknologi dan implikasinya dalam kehidupan hokum,pendidikan dan keagamaan serta pemakaian waktu luang.
4. Factor sosial dalam arti berbagai kebijakan ekonomi dan politik yang dikendalikan bagi masyarakat.¹⁵

2.1.2 Masalah Kemiskinan

Kemiskinan dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang, keluarga atau anggota masyarakat tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara wajar sebagaimana anggota masyarakat lain pada umumnya. Menurut emil salim, kemiskinan lazimnya dilukiskan sebagai kurangnya pendapatan dalam memenuhi kebutuhan hidup yang pokok, mereka dikatakan berada didalam garis kemiskinan apabila pendapatan tidak cukup memenuhi kebutuhan.¹⁶

¹⁵ Ibid hal 187

¹⁶ Ibid hal 190

Masalah kemiskinan merupakan alternative yang paling buruk bagi manusia dalam kehidupan masyarakat yang kini bertambah complex , kendatipun kemiskinan ditakuti oleh semua orang . banyak jalan keluar yang ditempuh menjadi bertambah tak beraturan , mulai dari tambal sulam, gali lobang tutup lobang .¹⁷

Menurut David C. Korten , terdapat tiga kebutuhan pokok yang sulit untuk dipenuhi oleh kaum miskin, yaitu : banyak orang miskin tidak mempunyai kekayaan produkti selain kekuatan jasmani mereka. Berkembang dan terpeliharanya kebutuhan tersebut tergantung pada semakin baiknya kesempatan untuk memperoleh pelayanan umum seperti pendidikan, perawatan kesehatan, dan penyediaan air yang pada umumnya tidak tersedia pada mereka yang justru paling membutuhkan.

Peningkatan pendapatan kaum miskin itu mungkin tidak akan memperbaiki taraf hidup mereka apabila barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan dan tingkat pendapatan mereka tidak tersedia.¹⁸ Mengikuti pendapat korten ,masalah kemiskinan ini bisa ditanggulangi dengan pengadaan pendekatan terhadap kebutuhan pokok tersebut yang pada hakikatnya adalah meningkatkan kesejahteraan dengan memberikan bantuan kepada mereka yang tidak mampu .¹⁹

Emil salim berpendapat bahwa, untuk memperbaiki nasib mereka, mesit ada campur tangan dan penyertaan aktif pemerintah membantu

¹⁷ Ibid hal 191

¹⁸ Ibid hal 192

¹⁹ Ibid hal 193

mereka keluar dari bawah garis kemiskinan. Emil salim menegaskan bahwa persoalan dalam mengatasi masalah ini ialah bagaimana cara pemerintah menjalankan kebijakan sehingga dapat mengurangi bahkan meniadakan kemiskinan .²⁰

2.2 Teori Produksi Ruang

Sebagai seorang ilmuwan sosial, Lefebvre tidak melepaskan dirinya begitu saja dari konteks-konteks sosial yang ada di sekitarnya. Pemikirannya lahir dari bagaimana ia merefleksikan perkembangan kehidupan masyarakat yang ia alami. Secara umum, sebenarnya Lefebvre sendiri banyak memberikan dan mengembangkan pemikirannya mengenai perkotaan dari perspektif sosiologis (*urban sociology*). Meski demikian, ia tidak memulai kariernya pertama-tama di bidang ini. Ia berpijak mula-mula pada ilmu sosiologi yang lebih menitikberatkan pada perkembangan perdesaan (*rural sociology*), hingga akhirnya menyadari bahwa *locus* perubahan dan perkembangan zaman lebih mengambil tempatnya di wilayah perkotaan yang ditandai dengan masifnya tingkat urbanisasi, baik dalam wujud mobilitas maupun transformasi wilayah menjadi urban.²¹

Pemikiran Lefebvre sendiri, terutama mengenai sosiologi perkotaan, terletak pada konteks pembangunan yang terjadi pasca perang dunia yang memporak porandakan negara barat secara khusus Prancis, negara-negara tersebut tidak ingin berkubang terlalu lama di dalam kehancuran dan

²⁰ Ibid hal 193

²¹ Paulus Bagus Sugiyono. Memahami Konsep Ruang Menurut Henri Lefebvre. Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.hal.8

kekalahannya sesama perang. Untuk itu pembangunan yang massif dilakukan bukan hanya semata-mata untuk menata kembali kehidupan masyarakat tetapi juga untuk menggenjot roda perekonomian.²² Lefebvre melihat konstruksi sosial atas ruang. Atau, dengan kata lain, ia ingin merumuskan bagaimana ruang itu diproduksi secara sosial, sebab pembentukan ruang selalu mengisyaratkan interrelasi yang terbentuk dari berbagai macam pihak yang terkait. Pihak-pihak ini memiliki kepentingannya (*interest*) masing-masing dan selalu berupaya untuk mewujudkan kepentingannya bagaimanapun caranya.

Permasalahannya persis terjadi ketika kepentingan dari beragam pihak ini saling bertemu satu sama lain. Terjadilah konflik sosial. Dan, yang menjadi korban adalah kelompok kecil dan terpinggirkan, yakni masyarakat perkotaan itu sendiri.²³ Lefebvre memaknai ruang sebagai sebuah isu yang melingkupi banyak disiplin ilmu. Dalam hal ini, Lefebvre bermaksud mengangkat ruang ke dalam sebuah perdebatan yang lebih konkret, yakni mempertemukan antara ruang sebagai sesuatu yang materiil dan memiliki bentuk fisik yang nyata dengan fenomena ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang terjadi dalam masyarakat perkotaan. Sebagai contoh, beberapa dekade terakhir ini, investasi perkotaan yang masif yang terwujud dalam bentuk pembangunan jalan, gedung tinggi, wilayah perkantoran, pusat perbelanjaan, jalan kereta api, serta berbagai infrastruktur lainnya

²² Ibid hal 12

²³ Ibid hal 10

ternyata hanya dirasakan manfaatnya oleh sekelompok orang saja, tetapi tidak bagi sekelompok masyarakat lainnya.²⁴

Salah satu magnum opus yang ditulis oleh Lefebvre terkait dengan konstruksi atau produksi ruang ini adalah karyanya yang berjudul *The Production of Space* yang ditulis pada tahun 1974. Di dalam karya ini, ia berupaya untuk menganalisis kota dalam skalanya yang lebih luas lagi. Lebih jauh lagi, di dalam karya tersebut, ia berpendapat bahwa identitas sebuah wilayah ditentukan oleh interrelasi antaraktivitas yang terkait dengan aspek politik dan ekonomi.²⁵

The Production of Space mendevisikan diri pada sebuah fenomenologi radikal untuk melihat ruang melalui pendekatan yang lebih humanis, di mana hak atas kota yang dimiliki baik oleh individu maupun komunitas terabaikan oleh upaya pengabstraksian ruang yang dilakukan oleh kapitalisme dalam berbagai bentuknya, serta pengetahuan teknokratik terutama oleh pihak negara atau pemerintah. Dalam sudut pandang yang lain, Lefebvre sebenarnya ingin mengatakan juga bahwa bagaimana kapitalisme telah menancapkan pengaruhnya dalam-dalam dan memiliki peran besar dalam membentuk ruang-ruang “privat” di wilayah perkotaan yang bertujuan untuk meningkatkan modal atau keuntungan bagi kelompok-kelompok masyarakat tertentu²⁶

²⁴ Ibid hal 12

²⁵ Ibid hal 12

²⁶ Ibid hal 12

Kota, menurut Lefebvre, tidak hanya merujuk pada wujud fisik atau ikatan sosial yang terjadi di dalamnya, tetapi keseluruhan dan interseksi dari setiap aspek yang ada, baik secara sosial, ekonomi, infrastruktur, nilai sosial dan etika, maupun budaya. Biagi (2020) melanjutkan, interseksi dari keseluruhan aspek inilah yang akhirnya terinkarnasi dan terejawantahkan secara nyata dalam dimensi spasial wilayah perkotaan.²⁷

Lefebvre melihat bahwa kota sungguh berada dalam ancaman industrialisasi kapitalis. Kota dimaknai sebagai “objek” yang diciptakan oleh tindakan manusia dipahami sejauh relasi antara aspek ekonomi, sosial, dan budaya dalam setiap tingkatan dalam masyarakat. Juga, kota dipahami sebagai tempat terjadinya pertukaran dan pencarian keuntungan, untuk menarik wisatawan, serta penanaman modal.. Inilah yang oleh Lefebvre disebut dengan depeasantization dan touristification. Proses “objektifikasi” atau menggunakan terminologi Marx, “komodifikasi wilayah perkotaan”, inilah yang akhirnya mengorbankan warga perkotaan yang seringkali tidak punya kuasa untuk membela diri. Posisi politisnya lemah.²⁸

2.2.1 Kontestasi Ruang

Kontestasi Ruang Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Lefebvre berpendapat bahwa ada beragam aspek yang turut serta dalam membentuk ruang. Aspek-aspek tersebut di antaranya adalah aspek ekonomi, politik, dan budaya. Pengaruh dari aspek-aspek ini akhirnya

²⁷ Ibid hal 13

²⁸ Ibid hal 14

membentuk dua ruang yang terpisah satu sama lain secara signifikan. Kedua ruang yang dimaksud adalah ruang abstrak (abstract space) dan ruang sosial (social space).²⁹

Di satu sisi, para pemilik modal atau bisnis, serta pemerintah seringkali mengkonsepsikan ruang melalui pertimbangan-pertimbangan yang abstrak, seperti ukuran, luas, lokasi, serta yang paling penting adalah keuntungan yang didapat dari proses objektifikasi ruang. Kerangka abstraksi digunakan untuk memetakan wilayah perkotaan. Dalam wilayah inilah, Lefebvre menyebut ruang sebagai ruang abstrak (abstract space). Sementara itu, di sisi lain, individu-individu yang ada dalam masyarakat menggunakan ruang yang ada di lingkungannya sebagai tempat untuk tinggal, hidup, dan beraktivitas secara konkret. Mereka menggunakan wilayah perkotaan dengan bebas dan tanpa tendensi apapun dalam kehidupan sehari-hari (every life). Dalam wilayah inilah Lefebvre menyebut ruang sebagai ruang sosial (social space)³⁰ Berakar mendalam pada pemikiran Marxian, Lefebvre mengatakan bahwa akan terjadi konflik atau friksi di antara dua ruang ini. Ruang yang dikonsepsikan secara abstrak untuk meraih keuntungan sebanyakbanyaknya akan “bertabrakan” dengan ruang yang digunakan secara nyata sebagai tempat masyarakat beraktivitas. Konflik ini tentu terjadi, karena adanya perbedaan ekspektasi dan kepentingan dari dua kelompok kelas sosial mengenai ruang di wilayah perkotaan.³²

²⁹ Ibid hal 15

³⁰ Ibid hal15

Lefebvre kemudian mengajukan konsep triadik dalam kerangka produksi ruang sosial. Konsep pertama adalah praktik spasial (*spatial practices*), yang mengacu pada interaksi dan komunikasi yang muncul dan selanjutnya membentuk ruang. Praktik spasial adalah produksi dan reproduksi hubungan spasial antara objek dan produk. Praktik-praktik ini menjamin kelangsungan produksi ruang sosial dan kekompakannya. Praktik spasial dapat dan memang dipengaruhi dimensi gender, ras, dan birokrasi- administratif. Namun praktik spasial dalam kendali kapitalisme kemudian terkait dengan sirkulasi kapital, reproduksi tenaga kerja, dan kebutuhan untuk mengontrol tenaga kerja.³¹

Dalam konsep praktik spasial, ruang sosial mencakup keterlibatan setiap anggota masyarakat yang memiliki hubungan atau relasi tertentu dengan kepemilikan ruang tersebut. Dengan demikian, kohesi sosial atas suatu ruang ditentukan oleh derajat kompetensi dan tingkat penggunaan ruang (fisik atau material).³²

Konsep kedua adalah representasi ruang (*representations of space*) yang mengacu pada wacana yang menggambarkan ruang yang telah dibentuk dan dapat ditemukan dalam bentuk peta, gambar, notasi, dan lain-lain. Representasi ruang terkait dengan rasionalitas teknokratis sains

³¹ Victor Imanuel W. Nalle. PENDEKATAN GEOGRAFI HUKUM KRITIS DALAM KAJIAN HUKUM TATA RUANG INDONESIA: SEBUAH WACANA FILSAFAT HUKUM DAN INTERDISIPLIN. *Justitia ET PAX* Jurnal Hukum Vol 37 No 1 Juni 2021. Hal 8

³² *Ibid* hal 8

positivis dan mewujudkan kecenderungan ke arah abstraksi, pemodelan matematis, dan kuantifikasi fenomena sosial. Lefebvre dalam bentukbentuk pengetahuan ini melihat adanya pendudukan ideologis dominan terhadap ruang dalam masyarakat yang membawa serta sekumpulan kode dan tanda intelektual. Dalam konteks ini, ruang merupakan produksi yang muncul dari konsepsi seseorang dan/atau beberapa orang³³.

Konsep ketiga ialah ruang representasional (representational space) yang mengacu pada dimensi simbolik ruang yang digunakan oleh orang-orang yang berinteraksi dalam ruang dan bersifat ideologis. Ruang representasional mencakup bagaimana penghuni ruang atau orang yang menggunakannya berinteraksi satu sama lain melalui praktik dan bentuk visualisasi dalam suatu ruang. Konsepsi ruang ini muncul berdasarkan berbagai pengalaman nyata yang dialami setiap orang sebagai sebab akibat dari hubungan dialektis antara praktik spasial dan representasi ruang. Ruang menjadi sesuatu yang secara khusus dipersepsi oleh individu, kelompok, atau masyarakat sehingga menjadi ruang yang dirasakan³⁴

Masing-masing dari ketiga dimensi ini beroperasi setiap saat dan menjadi titik awal untuk deskripsi ruang sosial Lefebvre. Di sisi lain, dialektika tiga pengalaman ruang tersebut juga menunjukkan tegangan khususnya antara ruang yang dibentuk dan praktik ruang sehari-hari.

³³ Ibid hal 8

³⁴ Ibid hal 8

Ruang yang dibentuk – dalam rupa teori atau kebijakan – seperti tarik menarik dengan ruang dalam praktik sehari-hari dengan membawa kepentingannya masing-masing³⁵

2.2.2 Hak Atas Kota

Lefebvre tidak hanya melihat wilayah perkotaan sebagai ruang konflik yang melibatkan aspek politik, ekonomi, dan budaya, tetapi juga menarik refleksinya yang lain ke arah bagaimana konflik mesti diselesaikan dan perjuangan atas keadilan kota harus dilakukan. Ketika melihat terjadinya fenomena ketidaksetaraan dan ketidakadilan pembangunan di wilayah perkotaan, Lefebvre mengemukakan pendapatnya mengenai *right to the city* bahwa terjemahan umum yang biasanya digunakan terkait terminologi ini adalah “hak atas kota”. Meski demikian, ada pula bentuk terjemahan lainnya yang juga seringkali digunakan di dalam teks-teks ilmiah berbahasa Indonesia, yakni “kedaulatan para penghuni kota.”³⁶

Lefebvre membagi tentang kepada siapa hak atas kota itu diberikan, yakni tangisan (*cry*) dan permintaan (*demand*). kedua kata ini sebenarnya merujuk kepada siapa hak atas kota itu ditujukan (*whose right*). Mereka yang memiliki hak itu tidak lain dan tidak bukan adalah orang-orang yang hak, kesempatan, dan partisipasinya terhadap wilayah perkotaan terampas. Dalam hal ini, mereka bukan hanya mengalami eksklusi sosial secara vertikal dalam rupa deprivasi ekonomi, tetapi juga secara horizontal

³⁵ Ibid hal 12

³⁶ Acid. Paulus Bagus Sugiyono.hal 19

di mana akses dan kesempatan mereka untuk berpartisipasi dalam pengelolaan kota dibatasi oleh pihak-pihak tertentu.

Lebih lanjut hak” menurut Lefebvre itu secara agak lebih konkret. Lefebvre menyebutkan bahwa hak-hak itu, misalnya, terwujud dalam beberapa kemungkinan, misalnya hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk mendapatkan beragam pelayanan, hak untuk mengungkapkan secara bebas pendapat mereka mengenai aktivitas-aktivitas yang mereka lakukan yang, dalam titik tertentu, terkait dengan bagaimana kota itu dikelola untuk mengakomodasi aktivitas-aktivitas yang terjadi.³⁹

Lefebvre mengadopsi pemikiran mengenai teori konflik seorang filsuf bernama Niccolo Machiavelli. Ruang di perkotaan menjadi sebuah arena pertarungan antara “the minuto popolo” (small people) dan “the popolo grasso” (fat people), antara mereka yang memiliki kuasa dan kewenangan dalam berbagai macam bentuknya dengan mereka yang bahkan suaranya saja tidak dapat terdengar di masyarakat. Dalam arti inilah wilayah perkotaan menjelma menjadi sebuah ruang konflik (a place of conflict), sebuah kata kunci yang diadopsi Lefebvre dari Machiavelli. Mereka yang berkuasa dan memiliki kewenangan mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengatur bagaimana wilayah perkotaan mesti dibentuk dan dikelola.⁴⁰

Lefebvre juga menegaskan adanya kesempatan untuk membentuk ruang sosial (social space) di mana masyarakat dapat terlibat aktif untuk mengelola ruang tersebut. Lefebvre, menyebutnya sebagai sebuah bentuk “revolusi urban” (urban revolution). Wilayah perkotaan menjadi tidak hanya

didominasi dan diatur oleh kepentingan-kepentingan tertentu saja, misalnya kepentingan ekonomi atau politik segelintir orang. Lefebvre menyebut partisipasi masyarakat ini sebagai “the work of art” (the city is an oeuvre). Partisipasi dimaknai sebagai sebuah seni untuk terlibat aktif mengelola ruang di mana mereka hidup dan tinggal. Dengan demikian, masyarakat perkotaan tidak hanya dilihat sebagai pihak pasif yang tinggal, menjalani aktivitas di wilayah perkotaan, serta menjalankan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pengelolaan perkotaan, tetapi juga berperan aktif untuk turut serta dalam berbagai macam bentuknya dalam mengelola perkotaan.³⁷

2.3 Teori Ruang Spatial

Ruang dan tempat secara umum atau proses urbanisasi secara khusus merupakan sebuah bisnis besar kapitalisme. Membangun kota baru atau mendorong urbanisasi adalah satu cara kunci dan efektif yang dilakukan untuk menyerap surplus atau kelebihan modal dari satu wilayah ke wilayah lainnya agar modal tidak berhenti berakumulasi. Melalui proses ini, proporsi yang signifikan dari angkatan kerja global total diserap dan dipekerjakan dalam berbagai bangunan dan lingkungan. Sejumlah besar modal terkait, umumnya dimobilisasi dalam bentuk pinjaman jangka panjang, disusun sejalan dengan proses pembangunan wilayah-wilayah perkotaan. Investasi yang didukung oleh pinjaman kerap menjadi episentrum dari pembentukan krisis. Hubungan antara urbanisasi,

³⁷ Ibid hal 20

akumulasi modal, dan pembentukan krisis membutuhkan kehati-hatian dan kecermatan kita dalam melihatnya

Saat kapitalisme menghadapi masalah penyerapan surplus modal dan pertumbuhan populasi, urbanisasi menyediakan sebuah jalan keluar untuk menyerap kelebihan surplus tersebut. Sebuah hubungan internal kemudian muncul antara surplus produksi, pertumbuhan populasi, dan urbanisasi. Sejarah tentang hubungan antara ketiganya tersebut sangat-lah menarik untuk dicermati. Harvey mengacu pada apa yang terjadi di Paris saat zaman Second Empire, yaitu antara 1852 hingga 1870.³⁸

Krisis ekonomi Eropa yang menghempaskan hampir seluruh negara di Eropa pada tahun 1848 adalah krisis pertama dalam sejarah yang berasal dari terjadinya surplus modal dan tenaga kerja secara bersamaan dan tampaknya saat itu tidak ada jalan keluar. Kelebihan modal tercermin dari surplus likuiditas di pasar, sementara kelebihan tenaga kerja adalah maraknya pengangguran. Krisis ini dirasakan paling berat di Paris dan akhirnya melahirkan revolusi dari kaum pekerja terhadap kaum borjuis, sebuah pemberontakan yang melihat bahwa republik sosialis adalah antidot atas keserakahan kapitalis dan ketidakseimbangan pendapatan yang mewarnai Perancis pada 1830 dan 1840.

³⁸ David Harvey, *A Companion to Marx's Capital Volume 1* (London: Verso Books, 2010), hlm 2

Kaum borjuis Republikan akhirnya berhasil memenangkan revolusi tetapi gagal mengatasi krisis. Hasilnya kemudian adalah naiknya Louis-Napoleon Bonaparte, yang merancang kudeta pada 1851 dan menjadikan dirinya Kaisar Napoleon III pada 1852. Untuk menjaga kekuasaannya, Kaisar melakukan tekanan politik terhadap lawan-lawannya, tetapi ia juga terkenal sebagai kaisar yang mampu mencari jalan keluar untuk menyerap surplus modal dan pengangguran yang tinggi di Paris saat itu. Ia mengumumkan sebuah program investasi infrastruktur besar-besaran baik di dalam maupun luar negeri.

Program luar negeri yang dimaksud di sini adalah pembangunan infrastruktur rel kereta api sepanjang Eropa dan turun ke Asia hingga daerah oriental di Asia Timur, termasuk juga dukungan pada pekerjaan besar seperti Terusan Suez. Di dalam negeri, yang dilakukan adalah melakukan konsolidasi jaringan kereta api, membangun pelabuhan dan dermaga, sistem pengairan, dan semacamnya. Tetapi di atas itu semua adalah sebuah rekonfigurasi dari infrastruktur perkotaan terhadap kota Paris. Bonaparte memanggil Baron Haussmann ke Paris untuk memimpin pekerjaan besarmengubah wajah kota Paris pada 1853.

Namun upaya Bonaparte yang mengubah wajah kota Paris itu mengandung juga sisi gelap yang terbentuk dari penyerapan surplus melalui transformasi perkotaan mengandung apa yang dinamakan sebagai 'creative destruction'. Tumbuh bermunculannya kota besar dan gedung-gedung pencakar langit melahirkan dimensi kelas-kelas, yang

biasanya kaum miskin, tidak berpendidikan, tidak memiliki akses, biasanya adalah yang termarginalkan dari kekuatan politik, yang akhirnya menderitapaling besar Kekerasan juga muncul dari proses urbanisasi ini, terutama dalam proses pembangunan geografi baru di atas puing-puing kota lama, ataupun pembukaan wilayah baru. Haussmann menggusur warga-warga Paris lama dengan menggunakan kekuasaan atas nama kepentingan publik. Secara sengaja ia menggusur tempat tinggal kaum pekerja dari pusat kota Paris.

Hasilnya adalah munculnya wilayah-wilayah kumuh (slums) baru di pinggiran yang menyimpan potensi kriminal dan kemiskinan. Harvey menggaris bawahi terdapatnya permasalahan kontradiksi internal dalam sifat modal, seperti antara modal dan buruh, modal dan alam/lingkungan, ketimpangan wilayah geografis, kemiskinan dan kekayaan, sebagaimana juga antara skala aktivitas yang berbeda, yang secara keseluruhan memberi bentuk material pada lanskap geografis. Lanskap geografis yang dibentuk oleh modal tidak semata-mata produk pasif yang terjadi begitu saja tanpa bentuk.³⁹ Modal bergerak ditentukan oleh aturan tertentu yang memiliki otonomi tetapi logika yang kontradiktif.

Bagaimana lanskap tersebut berkembang akan mempengaruhi akumulasi modal sebagaimana juga bagaimana kontradiksi modal dan kapitalisme termanifestasi dalam ruang, tempat, dan waktu.

³⁹ United Nations Development Program, Human Development Report 1996 and 1999 (New York: United Nations, 1999)

Berkembangnya lanskap geografis modal tersebut juga memiliki peran pada pembentukan krisis. Sifat inilah yang membuat kapitalisme bisa bertahan dari zaman ke zaman. Tanpa adanya pembangunan yang tidak seimbang secara geografis dan kontradiksi yang dikandungnya, modal sejak lama telah mengeras dan pecah berkeping-keping. Inilah cara-cara utama di mana modal secara periodik menemukan dirinya kembali. Pembangunan yang tidak Seimbang Secara Geografis dan Produksi Ruang Kisah Bonaparte dan Haussman dalam pembangunan kota Paris menjadi contoh yang kerap diangkat Harvey dalam menganalisis pembangunan ruang kota. Upaya menyerap surplus modal yang dilakukan dengan proyek-proyek besar dapat berakhir pada masalah-masalah etis, berupa ketimpangan, masalah sosial, dan lingkungan. Pada hakikatnya, modal memiliki sifat untuk berusaha berada pada lanskap geografis yang menguntungkan bagi reproduksi dirinya dan evolusi secara berkesinambungan.⁴⁰

Bila ada kesempatan untuk bergerak dan tumbuh di wilayah baru, modal akan melakukannya. Tidak ada yang aneh dengan itu karena semut melakukannya, berang-berang melakukannya, binatang melakukannya, jadi kenapa tidak dengan modal? Lanskap geografis dari kapitalisme, bagaimanapun juga secara terus menerus dibentuk oleh beragam tekanan teknis, ekonomi, sosial, dan politik dalam dunia yang terus menerus berubah.

⁴⁰ (Harvey, David, A Brief History of Neoliberalism, (Oxford: Oxford University Press, 2005), p 33)

Modal dan negara memiliki peran utama dalam memproduksi ruang dan tempat yang menjadi dasar bagi aktivitas pemilik modal atau kapitalis. Modal yang banyak akan dibutuhkan untuk membangun jalan kereta atau jalan tol, misalnya. Bagi modal, waktu adalah uang. Bergerak dari satu tempat ke tempat lain akan membutuhkan uang dan waktu. Kemampuan mengatasi tempat dan waktu inilah yang menjadi kunci bagi profitabilitas. Berbagai upaya ditempatkan pada inovasi – baik secara teknis, organisasi, maupun logistik untuk dapat mengurangi biaya dan waktu dari pergerakan spasial antar ruang. Para pencipta teknologi baru sangat menyadari akan hal ini. Mereka berkonsentrasi banyak pada upaya-upaya untuk menghasilkan cara-cara baru mengurangi biaya atau waktu dari sirkulasi modal.

Ekonomi-ekonomi regional yang terpisah membentuk keterkaitan yang saling lepas dan membentuk pembangunan yang tidak seimbang secara geografis saat beberapa wilayah cenderung menjadi lebih kaya dan beberapa wilayah menjadi lebih miskin.⁴¹ Harvey mengutip apa yang dikatakan oleh ekonom Gunnar Myrdal sebagai hal yang menyebabkan sirkulasi dan akumulasi.⁴² Wilayah yang lebih maju menarik aktivitasaktivitas baru karena gairah yang ditawarkan oleh pasar-pasar mereka. Umumnya wilayah tersebut memiliki kemudahan mendapatkan sumber daya infrastruktur sosial dan fisik dan kemudahan

⁴¹ Oxfam Davos Report, An Economy for the 1% (Oxfam Report, 2016)

⁴² David Harvey, Marx, Capital and The Madness of Economic Reason (London: Profile Books, 2017), hlm 194

mendapatkan pasokan faktor produksi, termasuk tenaga kerja. Sebagai hasilnya, semakin banyak modal yang tersedot masuk. Sementara di wilayah lain, yang tidak memiliki daya tarik tinggi, mereka terjebak dalam spiral depresi. Akibatnya, terjadilah ketidakseimbangan regional, ketimpangan geografis, terjadinya konsentrasi kekayaan, kekuatan, dan pengaruh.

Harvey mempertanyakan banyak hal terkait dengan ketimpangan pendapatan ini, salah satunya adalah apa yang menjadikan kesenjangan kekayaan dan pendapatan dapat dibenarkan dan diterima secara etis dan dengan cara apa ketidakadilan dapat dibenarkan. Kepedulian atas pertanyaan di atas telah *lama* ditanyakan para ilmuwan. Ada sebuah tradisi di kaum reformis borjuis bahwa keberadaan kesengsaraan dan kemiskinan yang amat sangat tidak bisa diterima dalam masyarakat sipil manapun. Lalu mengapa tidak banyak gerakan politik di AS yang ingin memperbaiki distribusi timpang yang terjadi di masyarakat mereka? Jawabannya terletak pada bagaimana pandangan umum seberapa jauh terhadap intervensi negara. Setiap kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah AS, terutama dari 1980 hingga 2008, umumnya berprinsip pada peran pemerintah yang minimal. Sulit untuk tidak menyimpulkan bahwa kepentingan modal memegang peranan penting, terutama dalam menekan upah buruh dan pajak. Namun tak dapat dipungkiri juga bahwa dunia saat ini berada dalam kondisi dengan tingkat

kemakmuran yang lebih dibandingkan sebelumnya. Jutaan orang sudah mampu keluar dari jerat kemiskinan di bawah sistem kapitalisme.

Kalau kita lihat di Cina, sejalan dengan pertumbuhannya yang fenomenal, sejalan juga dengan pertumbuhan di negara-negara seperti Brazil, Rusia, India, dan Indonesia, telah lahir kelas menengah yang jumlahnya signifikan. Ketimpangan kekayaan dan pendapatan dalam distribusi global telah banyak berkurang dengan naiknya pendapatan per kapita di berbagai negara. Disedotnya keuntungan modal dari Timur ke Barat, yang terjadi dalam dua puluh tahun terakhir, kini berbalik dengan masuknya modal dari Barat ke negara-negara Asia. Negara Asia Timur kini bahkan menjadi motor bagi ekonomi global. Namun menurut Harvey, fenomena tersebut menyimpan permasalahan karena sifatnya tidak berkelanjutan atau tidak stabil.

Dalam empat puluh tahun terakhir ada dua pergerakan yang dapat kita cermati. Pertama, terjadinya kecenderungan meningkatnya pendapatan perkapita di berbagai negara. Di sisi lain, terjadi peningkatan yang tinggi juga pada ketidakseimbangan pendapatan atau ketimpangan sosial antara individu dan grup-grup sosial pada hampir semua negara di dunia. Mengapa kecenderungan itu terjadi? Apakah yang terjadi dalam evolusi kontradiksi modal, atau terjadinya perjuangan hidup bagi reproduksi modal? Apakah ketimpangan ini diakibatkan oleh kontradiksi modal yang bergerak? Apakah terjadinya kerusuhan dan ketidakstabilan

sosial dikaitkan dengan hal ini? Berbagai pertanyaan ini mengemuka ketika karya Harvey membahas kontradiksi internal modal. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut,

Harvey mensyaratkan perlunya kita membangun pernyataan bahwa ketimpangan itu merupakan fondasi dasar dari modal. Ketimpangan itu berasal dari kenyataan sederhana bahwa modal secara sosial dan historis dikonstruksi sebagai sebuah dominasi kelas atas kaum buruh. Distribusi pendapatan kekayaan antara modal dan buruh memang harus tidak seimbang apabila modal ingin terus melakukan produksi dan reproduksi. Keseimbangan distribusi dan modal secara hakikatnya memang tidak kompatibel. Justru terjadinya ketidak seimbangan ini sebenarnya yang mendahului lahirnya kapitalisme

Meskipun ketimpangan geografis terjadi, kondisi tersebut memberi keuntungan bagi para buruh karena dengan begitu terjadilah penciptaan lapangan kerja di mana-mana. Semakin banyak kapitalis yang melakukan ekspansi, akan semakin banyak lapangan kerja yang dibuka, yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan dari para buruh. Namun menurut Harvey, cerita itu tidak lengkap. Modal melakukan investasi dan reinvestasi lalu membuka lapangan kerja, hanya bila aktivitas itu menghasilkan keuntungan.⁴³ Modal hanya bergerak ke kota-kota yang memiliki potensi keuntungan, sehingga pada gilirannya justru

⁴³ David Harvey, *Seventeen Contradictions and The End of Capitalism* (NY:cOxford University Press, 2014), hlm. 3

menyebabkan ketimpangan antar wilayah karena terdapat daerah-daerah yang tidak menarik bagi modal untuk menetap dan bertumbuh. Tiga resesi terakhir di AS diikuti oleh meningkatnya pengangguran karena tidak ada insentif keuntungan bagi kapitalis meskipun upah saat itu sangat rendah dan jumlah buruh yang membutuhkan pekerjaan banyak jumlahnya.

Pertama, modal memiliki sejarah panjang yang selalu sukses dalam mengatasi masalah-masalah ekologi yang dihadapinya, tidak peduli apakah hal tersebut merujuk pada penggunaan sumber daya, kemampuannya menyerap limbah polusi, atau mengatasi degradasi habitat, hilangnya keanekaragaman alam hayati, maupun menurunnya kualitas udara, air, dan tanah. Kita tentu telah banyak membaca di masamasa lalu begitu banyaknya ramalan-ramalan tentang kehancuran kehidupan, kiamat peradaban, akibat kapitalisme yang menyebabkan kerusakan dan kelangkaan sumber daya alam. Namun hingga saat ini ramalan itu sebagian besar tidak terbukti sepenuhnya benar. Di tahun 1798 Thomas Malthus pernah memprediksi bencana sosial (meluasnya kelaparan, perang, dan penyakit) sebagai dampak pertumbuhan populasi yang eksponensial dan tidak sebanding dengan pertumbuhan pasokan makanan.

Tahun 1970 Paul Ehrlich, seorang pakar lingkungan, berargumen bahwa kelaparan secara meluas diperkirakan terjadi dalam sepuluh tahun ke depan, tetapi hal itu tidak terbukti Kedua, pemaknaan kata

“lingkungan” yang selama ini digunakan sebagai objek eksploitasi maupun pemanfaatan oleh modal yang berlebihan sehingga berdampak balik pada kehidupan manusia, terinternalisasi dalam proses akumulasi dan sirkulasi modal. Artinya lingkungan dan modal menyatu dalam prosesnya dan tidak untuk menjadi sebuah dikotomi.

Penjelasannya seperti ini, kemampuan sebuah tanaman misalnya saja kelapa sawit, untuk dapat tumbuh berkelanjutan merupakan satu kepentingan yang sama dengan kemampuan modal untuk tumbuh. Oleh karenanya dalam industri agribisnis, pada upayanya memperoleh keuntungan dan reinvestasi kembali keuntungan untuk memperluas usahanya, dan menjaga keberlangsungan tanaman sawit menjadi sebuah prioritas. Ketahanan lingkungan, kesehatan lahan, pupuk, hingga ketersediaan petani dan pekerja, menyatu dalam kepentingan modal mencari keuntungan

Ketiga, modal telah mengubah alam dan lingkungan menjadi sebuah bisnis raksasa. Teknologi ramah lingkungan saat ini menjadi sebuah tiket bagi perusahaan-perusahaan di negara maju untuk bisa masuk ke bursa saham. Lingkungan, sebagaimana dikatakan Neil Smith, telah menjadi sebuah strategi akumulasi. Ketika penggunaan teknologi memberi dampak pada lingkungan, langkah selanjutnya adalah menciptakan teknologi baru untuk mengatasi dampak tersebut ataupun mencari pengguna yang bisa memanfaatkan investasi yang telah dikeluarkan. Hal ini pada gilirannya menuntut sebuah kemampuan untuk kreatif dan menciptakan kreasi ketimbang memuaskan kebutuhan konsumen. Obat

baru diciptakan untuk mengobati satu penyakit lalu mengakibatkan efek samping, dan diciptakan lagi obat untuk mengatasi efek samping tersebut. Hal ini berlangsung terus menerus.

Demi keuntungan, modal akan menangkap dialektika tentang bagaimana kita dapat mengubah diri kita sendiri dengan mengubah dunia (dan sebaliknya). Semua proyek ekologi dan lingkungan adalah proyek sosial ekonomi (dan sebaliknya). Segala hal yang bergantung pada tujuan sosial ekonomi dan proyek ekologi, dihadapkan pada pertanyaan; apakah proyek ini ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat atau pencapaian tingkat keuntungan? Tentu saja di beberapa proyek kemanusiaan, seperti air bersih dan kesehatan masyarakat, dialektika ini bekerja pada keuntungan masyarakat luas, kadang bahkan mengorbankan keuntungan.

Dukungan yang populer bagi bisnis-bisnis besar harus menyeimbangkan konsekuensi untuk memberi keuntungan pada modal dan lingkungan secara politik. Namun kita dapat melihat dari sisi politik, kadang hal ini lebih terlihat simbolik ketimbang substantif. Hal ini yang disebut oleh

Harvey dengan istilah “greenwashing” atau menutupi proyek yang keuntungannya besar sebagai proyek yang terlihat peduli dan mendukung kemanusiaan. Proposal Al Gore mengenai gerakan lingkungan untuk peduli pada pemanasan global dimanfaatkan negara-negara maju untuk menciptakan pasar baru perdagangan emisi karbon, yang kemudian menjadi ajang spekulasi dan keuntungan bagi

perusahaan-perusahaan finansial ketimbang mengurangi emisi karbon sebagaimana cita-cita awalnya.

Keempat, yang menurut Harvey adalah hal yang paling tidak nyaman untuk dibicarakan adalah bahwa modal sangatlah mungkin untuk tetap memperoleh keuntungan dan bersirkulasi dalam kondisi bencana dan kerusakan alam sekalipun. Bencana alam menciptakan banyak peluang bagi “kapitalisme bencana” untuk memperoleh keuntungan yang berlimpah.

Kematian akibat kelaparan dan kerusakan habitat lingkungan tidak serta merta menyebabkan kesulitan bagi modal (kecuali kemudian terjadi perang atau kekacauan yang merusak segalanya) karena pada dasarnya banyak populasi di dunia ini yang bagi modal sudah digolongkan pada orang yang terpinggirkan dan tidak dapat dimanfaatkan bagi keuntungan. Dan modal tidak pernah mengecil atau berhenti untuk meraih keuntungan di atas berbagai permasalahan kemanusiaan sekalipun. Meskipun hubungan modal dengan lingkungan dapat saling menyesuaikan sepanjang sejarah, pertanyaan yang diajukan Harvey adalah, bagaimana hubungan antara modal dan lingkungan tersebut menjadi berbahaya, atau fatal bagi reproduksi modal? Dalam perjalanannya, terutama sejak beberapa puluh tahun terakhir, modal tidak bisa menjaga kesatuan dirinya dengan alam sebagai sebuah harmoni yang berkelanjutan.

Hal ini karena bagi modal, alam pada ujungnya adalah sebuah obyek bagi produksi. Alam adalah sebuah nilai guna potensial yang dapat

dimanfaatkan secara langsung maupun tidak langsung untuk realisasi komoditas Harvey menyimpulkan betapa berbahayanya kepemilikan modal terhadap lingkungan yang tidak disertai rasa tanggung jawab.⁴⁴ Hal pertama yang perlu kita perhatikan adalah meningkatnya kekuatan kelas investor (khususnya properti atau investasi finansial) untuk mendapatkan kekayaan dan pendapatan tanpa harus susah payah melakukan produksi. Kepemilikan dan komodifikasi tanah atau hutan serta kelangkaan alam memungkinkan lahan tidur untuk diekstraksi hasilnya dan ia mengambil persentase keuntungan darinya

Dari pemaparan di atas setidaknya Harvey mencatat dua hal. Pertama, betapa pentingnya modal merangkul dan membangun payung kepedulian alam dan lingkungan sebagai fondasi legitimasi bagi bisnis besar lingkungan hidup di masa depan. Dengan dibangunnya payung “kepedulian lingkungan”, modal dapat mengarahkan diskursus-diskursus ekologi, mendefinisikan alam dan lingkungan dalam pengertiannya sendiri, dan mampu mengelola modal - termasuk kontradiksinya ke dalam kepentingan kelasnya sendiri. Kedua, semakin dominan mesin ekonomi modal berada dalam formasi sosial yang membentuk kapitalisme, semakin peraturan yang berhubungan dengan metabolisme alam dan modal mendominasi diskursus publik, politik, dan kebijakan.⁴⁵

⁴⁴ David Harvey, *Seventeen Contradictions and The End of Capitalism*. Hal. 9

⁴⁵ Trevor Barnes, *Between Deduction and Dialectics A Critical Reader David Harvey* (Oxford: Blackwell Publishing, 2006), hlm 26-46

Harvey mengindikasikan terjadinya degradasi pada kualitas ekosistem modal. Kebanyakan hal tersebut dikaitkan dengan pesatnya urbanisasi dan konstruksi kota-kota baru (yang kerap disebut Harvey dengan istilah “second nature” atau alam kedua) yang memiliki kualitas rendah.⁴⁶ Pertarungan modal untuk berjuang memperbaiki kondisi ekologis terus menerus berlangsung dan semakin tajam. Efek ekologis umumnya dirasakan oleh perusahaan kapitalis dalam bentuk biaya lainnya atau oleh para ekonom biasa disebut ‘eksternalitas’, yang didefinisikan sebagai biaya-biaya yang timbul sebagai akibat operasional perusahaan tetapi tidak perlu dibayar (seperti polusi atau limbah yang dibuang ke udara atau air).

Merujuk dari pemaparan diatas, penelitian ini menggunakan teori ruang spatial yang di kemukakan oleh David Harvey dalam melihat ketimpangan yang diciptakan dari penguasaan sumber ekonomi. Penguasaan ekonomi yang dijelaskan oleh David Harvey dalam teori-nya menyangkut ruang spatial menjabarkan adanya ketimpangan yang ditunjukkan dari perkembangan perkotaan pada era modern. Perkembangan kapitalisme mereduksi penggunaan ruang yang ada di perkotaan. Perkotaan era modern ini, memperlihatkan perbedaan yang sangat jelas antara dua sisi. Berangkat dari hal tersebut, peneliti merujuk

⁴⁶ Bidet and Kouvelakis, *The Growing Significance of Anglophone Marxism (Recent French Survey: 2001)*.

pada apa yang dikemukakan David Harvey dalam menganalisis fenomena keberadaan anak jalanan di kota Makassar.

Penelitian ini melihat hadir dan bertambahnya anak jalanan di kota Makassar di sebabkan perbedaan ketimpangan yang sangat besar. Ketimpangan ini yang di jelaskan oleh David Harvey timbul dari efek dari perkembangan kapitalisme. Kemunculan anak jalanan di kota Makassar pada penelitian ini akan di analisis berdasarkan teori ruang spatial David Harvey sebagai usaha dalam menjawab rumusan masalah.

2.4 Telaah Pustaka

Tulisan yang pertama ialah , penelitian yang dilakukan oleh imanuel jaya yang berjudul Implementasi Kebijakan Penanganan Gelandangan, Pengemis, Tuna Susila Dan Anak Jalanan di palangkaraya. Penelitian ini membahas dan menguraikan penyebab terhambatnya implementasi tentang kebijakan anak jalanan di palangkaraya, dimana penyebabnya di karenakan oleh beberapa faktor yaitu tidak adanya fasilitas panti rehabilitasi untuk memberikan bimbingan sosial, maupun mental bagi para pelaku gelandangan pengemis, tuna susila dan anak jalanan.

Penelitian ini menyoroti tentang kurangnya sosialisasi pemerintah kepada masyarakat terkait kebijakan ini. Selain itu penelitian ini juga menyoroti kebijakan no 09 tahun 2012 yang masih terdapat kekurangan didalamnya dan menyarankan untuk dilakukannya evaluasi terhadap

peraturan ini . penelitian ini menggunakan teori edward III tentang implementasi kebijakan.

Kedua, sakman Studi Tentang Anak Jalanan (Tinjauan Implementasi Perda Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Dan Pengamen Di Kota Makassar). penelitian ini berfokus kepada Karakteristik anak jalanan di Kota Makassar bervariasi ditinjau dari beberapa aspek sebagai berikut: asal-usul daerah anak jalanan, usia anak jalanan, aktivitas anak jalanan, latar belakang keluarga anak jalanan, kesadaran anak jalanan akan hak-haknya, faktor-faktor yang menyebabkan anak turun ke jalanan serta Implementasi Perda Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 dalam pembinaan anak jalanan dapat digambarkan dari segi substansi hukum.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang dimaksudkan untuk memberi gambaran dan penjelasan mengenai Karakteristik anak jalanan di Kota Makassar, Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 dalam pembinaan anak jalanan di Kota Makassar, serta Strategi pemerintah kota dalam mengatasi hambatan-hambatan pelaksanaan pembinaan anak jalanan di Kota Makassar. Populasi penelitian ini adalah Pejabat Dinas Sosial Kota Makassar, Pembina LSM, dan Anak jalanan. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara purposive sampling dan Accidental sampling. Penarikan sampel secara purposive sampling digunakan untuk menentukan sampel dari : Pejabat Dinas Sosial Kota Makassar, Pembina LSM, Satpol PP, Pengurus Panti Sosial, sedangkan penarikan sampel

secara Accidental sampling digunakan untuk menentukan sampel dari anak jalanan. Pengambilan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi

Ketiga, penelitian dari Tuti Bahfiarti(1) , Rahmat Muhammad(2) , Aminuddin(3) yang Berjudul Kajian Penanganan Anak Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Makassar (Study On Handling Of Children And Beggars In Makassar City). Penelitian ini berfokus kepada menemukan dan mengidentifikasi karakteristik tindakan operasional dan pengembangan masyarakat dan strategi program pemberdayaan melalui Dinas Sosial Pemerintah Kota Makassar dan sasaran yang digunakan dalam pendekatan kualitatif berusaha untuk menginterpretasikan makna dan fakta lapangan, termasuk fenomena anak tunawisma dan pengemis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan perasional anak jalanan di kota makassar pada umumnya disebabkan oleh faktor keluarga, dan kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi permasalahan anak jalanan dan kemiskinan ialah dengan menggunakan kebijakan antisipatif. selain itu menggunakan pola rehabilitasi dan menjalankan kampanye untuk menjalankan fungsi pendidikan.

Sementara yang membedakan penelitian ini dengan ketiga penelitian di atas ialah. Penelitian ini lebih berfokus kepada penyebab semakin bertambahnya jumlah anak jalanan di kota makassar di tinjau dari sosiologi politik.

2.5 Kerangka Pemikiran

Kemiskinan merupakan suatu permasalahan sosial yang sampai saat ini tidak dapat di selesaikan. Hal ini kemudian berimbas kepada anak-anak yang memiliki keterbatasan ekonomi lebih memilih turun ke jalan dan membantu keluarga mereka untuk memenuhi kebutuhan keseharian keluarga mereka. Selain itu beberapa dampak pembangunan yang terjadi di kota Makassar juga kerap mengakibatkan pengusuran terhadap wilayah yang di anggap kumuh. Dimana notabeneanya wilayah tersebut dihuni oleh mereka yang kalah bersaing dalam hal perekonomian.

Pemerintah kota Makassar telah melakukan berbagai upaya dalam menanggulangi permasalahan terkait keberadaan anak jalanan di kota Makassar. Dengan berlandaskan perda No 2 tahun 2008 , pemerintah kota Makassar kemudian melakukan berbagai program yang berfokus untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan keberadaan anak jalanan di kota Makassar dengan melakukan kerja sama dengan berbagai struktur pemerintahan dan masyarakat. Namun jumlah anak jalanan masih saja terus bertambah setiap tahunnya.

Penelitian ini berfokus pada penyebab peningkatan jumlah anak jalanan di kota Makassar dan untuk melihat peran pemerintah dalam melakukan upaya penanggulangan jumlah anak jalanan yang terus meningkat..Untuk membantu menjawab fenomena peningkatan anak jalanan di kota makassar, maka penulis memeeilih untuk menggunakan pendekatan sosiologi poltik untuk melihat hubungan antara anak jalanan

dan pemerintah, teori ruang special untuk melihat pola dan factor yang mempengaruhi tindakan anak jalanan sehingga memilih untuk turun kejalan dan teori representasi ruang guna melihat upaya dan peran pemerintah dalam menangani permasalahan terkait anak jalanan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sebagai dasar penelitian dengan memfokuskan proses pengambilan data menggunakan wawancara langsung kepada narasumber yang memahami menyangkut masalah dalam penelitian ini. Metode ini diharapkan dapat dengan jelas mendeskripsikan data yang didapatkan menyangkut permasalahan penelitian ini

2.6 Skema Pemikiran

